

ABSTRAK

TINJAUAN KEPATUHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TAHUN PAJAK 2011 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Oleh : Riandy Saputra

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru yang berlangsung sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun pajak 2011 dan untuk mengetahui kendala-kendala yang terdapat dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun pajak 2011 tersebut.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi ke lapangan dan wawancara dengan pegawai dan staf di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : tingkat kepatuhan wajib pajak baik badan maupun orang pribadi masih kecil dan rendah sehingga belum dapat dikatakan baik. Hal ini dapat terlihat dari rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dimana untuk rasio kepatuhan badan yaitu 43,89 % dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi rasionya adalah 34,50 %.

Kendala-kendala yang ditemukan dalam hal pelaporan SPT Masa PPN tahun pajak 2011 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan antara lain tentang kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak masih sangat rendah yaitu berada di bawah 50 %. Selain itu juga banyak kendala-kendala lainnya yang masih dilakukan oleh para wajib pajak sebagai contoh masih banyak para wajib pajak yang tidak mau melaporkan sendiri SPT Masa PPN yang terutang tetapi mereka mengutus orang lain atau para perantara untuk melaporkan pajak yang terutang pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Selain itu wajib pajak juga merasa terbebani dengan membayar pajak dan sistem perpajakan yang dirasa rumit dan sulit untuk dipahami para wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Kata Kunci : Kepatuhan, Pelaporan Pajak, SPT Masa, Pajak Pertambahan Nilai.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah rabbi 'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis berupa Tugas Akhir yang berjudul ***“Tinjauan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2011 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan”*** yang akan dijadikan sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

Shalawat beriringan salam tak lupa juga penulis ucapkan kepada nabi besar junjungan alam dan idola semua umat yakni nabi besar Muhammad S.A.W yang telah membawa perubahan besar pada setiap aspek kehidupan umat manusia hingga saat ini.

Mengingat keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis, maka penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan tangan terbuka dan berlapang dada maka penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang bertujuan untuk penyempurnaan tugas akhir ini nantinya.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril ataupun materil. Untuk itu atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. M. Nazir** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
2. Bapak **Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
3. Bapak **Mahmuzar, M.Hum** selaku Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau dan sekaligus Pembimbing Akademis penulis selama perkuliahan.
4. Ibu **Mustiqowati Ummul Fithriyah, M.Si** selaku Sekretaris pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

5. Bapak **Khairil Henry, S.E, M.Si, Ak** selaku Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak dan Ibu para dosen-dosen penulis yang telah memberikan ilmu dan pengalamann kepada penulis selama masa perkuliahan serta seluruh karyawan dan pegawai yang ada di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
7. Bapak **Yunus Darmono, S.H** selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan, Bapak **Zulkifli, S.Sos** selaku Kepala Bagian Umum, Bapak **Rohdiono, S.E, M.M** selaku Kepala Seksi Pelayanan, Mas **Annas** dan keluarga, **Bang Fredy, Kak Rahma** dan seluruh pegawai serta karyawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan Tugas akhir ini.
8. Ibu **Liesvera Indriani** dan adinda **Liesa Muzdalifa** dan keluarga, Ibu **Marni** dan keluarga, Ibu **Dra. Hj. Desmi** dan Bapak **H. Syamsir** serta seluruh anggota keluarga yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan baik bantuan dana maupun semangat dan motivasi.
9. Seluruh dewan guru “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” jembatan ilmu penulis yang ada di **MAN 1 Pekanbaru, SMP N 3 Pekanbaru, SD 001 Senapelan Pekanbaru** yang telah berjasa memberikan dan membimbing penulis dalam menuntut ilmu selama ini.
10. Kepada kakak-kakak ku (**Fitri, Zur, Sri, Tuti**), abang ku **Inal**, adek-adek ku (**Nia, Budi, Abdul**) dan seluruh keponakan dan keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi selama ini.
11. Kepada seluruh teman-teman ADP angkatan 2009/2010 (**Abu, Irfan, Ajlan, Amsal, Andika, Ari, Berta, Fina, Eka, Eri, Ezi, Fatma, Ayu, Khairul, Rido, Amoy, Burhan, Ana, Rahim, Iing, Nita, Rani, Ranti, Refi, Reni El, Reni Sa, Riki, Risky, Aldo, Serly, Siti, Syafi'i, dan Wira**) serta adek-adek tingkat penulis yang ada pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau terima kasih buat semuanya.
12. Buat Abah (**K.H. Abu Zazid, SH, M.Pd.I**) dan Umi (**Hj. Norhayati**), rekan-rekan guru teman seperjuanganku di SMP IT AL HISA (Ustadzah Zumrotuzzakiah, S.Pd dan keluarga , Ustadz Huda) seluruh anak didik ku murid-murid yang ku sayangi di SMP IT AL HISA (**Abi, Apri, Galih, Hanif, Irham, Pras, Diah, Adi, Tri, Tiyo,**

Ahmad, Dewi, Alif, Hesti, Yola, Ismi, Afif, Fiqhi, Diana, Santi, Vira, Mega, Itsna, Nita, Cintia, Dicky, Mahdi, Norwi, Aldi, Ardi, Jhorgi, Diyan, Gufran, Zakir, Adib, Andri, Huda, Agung, dkk) dan seluruh keluarga besar Yayasan AL HISA.

13. Buat Muchtar, Abu Hasby dan Keluarga besar Mandiri Komputer, Ikhwan dan Akhwat generasi qur'ani pemimpin masa depan dimanapun berada serta seluruh teman-teman dan sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dorongan dan semangatnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pekanbaru, 02 Mei 2012
Penulis

RIANDY SAPUTRA
NIM. 00976008581

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

LEMBAR PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR TABEL..... viii

DAFTAR LAMPIRAN..... ix

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

I.1. Latar Belakang Masalah..... 1

I.2. Perumusan Masalah 5

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 5

I.3.1. Tujuan Penelitian 5

I.3.2. Manfaat Penelitian 6

I.4. Metode Penelitian 6

I.4.1. Tempat Penelitian 6

I.4.2. Waktu Penelitian..... 7

I.4.3. Jenis Data 7

I.4.4. Metode Pengumpulan Data 7

I.4.5. Analisis Data 8

I.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 8

**BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
PEKANBARU TAMPAN 11**

II.1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Pekanbaru Tampan.....	11
II.2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)	12
II.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan.....	13
II.4. Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Tampan.....	14
II.5. Wilayah Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan	16
II.6. Sumber Daya dan Aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan	17
BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	20
III.1. Tinjauan Teori	20
III.1.1. Pengertian Pajak	20
III.1.2. Fungsi Pajak	21
III.1.3. Sistem Pemungutan Pajak	22
III.1.4. Asas Pemungutan Pajak	23
III.1.5. Kepatuhan Perpajakan.....	24
III.1.6. Pelaporan Pajak	26
III.1.7. Masa Pajak Dan Tahun Pajak.....	26
III.1.8. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	27
III.1.9. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	28
III.1.10. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	29
III.1.11. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	31
III.1.12. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	32
III.1.13. Syarat Terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	33
III.1.14. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	34
III.1.15. Tarif Dan Cara Menghitung PPN	34
III.1.16. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT).....	35
III.1.17. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN	36
III.1.18. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN	37
III.1.19. Penyetoran Dan Pelaporan SPT Masa PPN	37
III.1.20. Sanksi Administrasi Perpajakan.....	38
III.1.21. Pandangan Islam Tentang Pajak	39
III.2. Tinjauan Praktek.....	42
III.2.1. Pendistribusian SPT Masa PPN Di Kantor Pelayanan	

Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan	42
III.2.2. Pelaporan SPT Masa PPN Ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan	43
III.2.3. Bagian Yang Terkait Dengan Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan	44
III.2.4. Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2011 Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan	46
III.2.4.1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	46
III.2.4.2. Kepatuhan Wajib Pajak Badan	48
III.2.5. Kendala-Kendala Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan	50
BAB IV : PENUTUP	52
IV.1. Kesimpulan	52
IV.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	18
Tabel II.2	: Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Tabel II.3	: Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Berdasarkan Tingkat Usia.....	19
Tabel III.1	: Pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak Orang Pribadi	47
Tabel III.2	: Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak Orang Pribadi	48
Tabel III.3	: Pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak Badan.....	49
Tabel III.4	: Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak Badan	50

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Suksesnya pembangunan nasional di Indonesia tidak terlepas dari tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pembangunan. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional maka peran pajak sebagai sumber penerimaan negara akan semakin besar, baik pada masa kini ataupun pada masa yang akan datang. Oleh karena itu penerimaan negara dari sektor pajak perlu diimplementasikan secara maksimal untuk menjalankan roda pemerintahan dan proses pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber dana yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara yang merupakan cerminan peran masyarakat dalam pembiayaan pengeluaran negara yang sudah diatur dalam undang-undang.

Pajak merupakan suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung yang nantinya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak yang ada saat ini tidak hanya dipungut oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi juga memiliki wewenang yang sama dalam memungut pajak daerah seperti pajak restoran, pajak

hotel, pajak hiburan dan yang lainnya. Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah Pajak Pertambahan Nilai atau disingkat PPN.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung. Hal ini dikarenakan Pajak Pertambahan Nilai ini dapat dibebankan kepada pihak lain yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk membayarkannya. Pajak Pertambahan Nilai ini dikenakan atas pertambahan nilainya saja bukan pada barang atau jasanya. Suatu pertambahan nilai tercipta karena adanya kegiatan menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diadopsi di Indonesia pada tanggal 1 April 1985 yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1950. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan beberapa kali perubahan terhadap undang-undang perpajakan. Di antara reformasi tersebut yaitu mengganti Undang-Undang No 8 Tahun 1984 dengan Undang-Undang No 11 Tahun 1994, yang kemudian menggantinya lagi dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2000 dan terakhir kalinya dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah. Hal ini dimaksud agar kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meningkat. Di samping itu hal ini juga menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai yang dirasa sulit bagi para wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang tercermin dengan naiknya rasio pajak (*tax ratio*).

Salah satu kendala dalam bidang perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak masih sangat rendah. Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan sistem perpajakan yang belum maksimal di Indonesia. Saat ini di Indonesia menganut sistem *self assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kesempatan penuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada pihak pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dibantu oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Pelaksanaan *self assessment system* belum dapat dikatakan maksimal. Karena sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang belum patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dan masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam bidang perpajakan baik yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja mulai dari kesalahan kecil hingga kesalahan besar sekalipun.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh wajib pajak baik itu Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun bagi pemungut pajak untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan jumlah pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) ada dua jenis yaitu Masa dan Tahunan. Salah satu SPT masa adalah SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika kita lihat dari bentuk fisiknya, SPT Masa PPN terdiri atas SPT yang berbentuk formulir kertas dan SPT yang berbentuk data elektronik (e-SPT).

Dalam pelaksanaannya masih banyak terlihat kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang status hukumnya berbentuk badan dan orang pribadi. Fakta di lapangan masih terdapat PKP yang secara teoritis sudah dapat dikenakan pajak tetapi tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Contoh lain dari kesalahan yang sering dilakukan oleh PKP adalah masih banyak yang terlambat melaporkan SPT dan bahkan ada juga PKP yang tidak melaporkan pajak terutangnya sama sekali melalui SPT.

Pelaporan SPT harus dilaksanakan dengan benar, jelas dan tepat waktu. Hal ini berlaku untuk semua jenis pajak termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai. Semua pelaporan SPT harus diketahui oleh pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Salah satu KPP yang berwenang dalam hal ini adalah KPP Pratama Pekanbaru Tampan, yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya termasuk juga dalam pelaporan SPT Masa PPN.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya tulis yang berjudul : “ **Tinjauan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2011 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan** ”.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perurnusan masalah yang dapat penulis sampaikan yaitu :

- a. Bagaimanakah kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun pajak 2011 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan ?
- b. Kendala-kendala apa saja yang ada dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun pajak 2011 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan ?

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun pajak 2011 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun pajak 2011 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

I.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dituangkan dalam tulisan ini yaitu :

- a. Sebagai sumber informasi dan pedoman bagi para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
- b. Sebagai sumber informasi dan masukan bagi para pegawai dan staf pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan
- c. Sebagai sarana dan media untuk menambah wawasan penulis dalam masalah perpajakan terutama tentang Pajak Pertambahan Nilai
- d. Sebagai sumber referensi bagi penulis lainnya pada masa yang akan datang

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Tempat Penelitian

Penelitian penulis ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang beralamat di Jln.SM. Amin / Ring Road Arengka II Pekanbaru Riau, Telepon. (0761) 40836.

1.4.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai Maret 2012.

1.4.3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada para pegawai dan staf KPP Pratama Pekanbaru Tampan terutama kepada kepala seksi pelayanan dan kepala seksi pengawasan dan konsultasi (waskon) yang berkaitan dengan masalah penelitian

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang penulis peroleh dalam bentuk laporan, catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah penelitian melalui KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

1.4.4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu penulis mengamati secara langsung ke lapangan dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Interview

Yaitu penulis mengajukan tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai dan staf KPP Pratama Pekanbaru Tampan khususnya kepada kepala seksi pelayanan yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diperlukan oleh penulis.

1.4.5. Analisis Data

Setelah data-data yang sudah dikumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang tidak dinyatakan dengan angka-angka tetapi dengan deskripsi saja.

1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam sebuah penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami sehingga mencapai sasarannya. Dalam penulisan tugas akhir ini bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II: GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasinya, uraian tugas, wilayah kerja.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan teoritis dari masalah penelitian antara lain pengertian pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, pengertian kepatuhan, pelaporan pajak, masa dan tahun pajak, pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dasar hukum PPN, karakteristik PPN, objek PPN, subjek PPN, saat terutang PPN, dasar pengenaan PPN, tarif dan cara menghitung PPN, pengertian Surat Pemberitahuan (SPT), fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, jenis SPT Masa PPN, waktu pelaporan dan penyetoran SPT Masa PPN, sanksi administrasi dalam bidang perpajakan serta pandangan islam tentang pajak dan perpajakan.

Sedangkan tinjauan praktek yang nantinya akan dijelaskan dalam tugas akhir penulis antara lain tentang pendistribusian SPT Masa PPN, pelaporan SPT Masa PPN, bagian yang terkait dengan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN, dan kendala dalam pelaporan SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah penelitian dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan bagi penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

II.1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Pada awalnya, di kota Pekanbaru hanya terdapat satu Kantor Pelayanan Pajak, yaitu KPP Senapelan. Saat itu masih terdapat Kantor Pelayanan PBB Pekanbaru dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pekanbaru.

Seiring dengan perkembangan kota dan wilayah, kota Pekanbaru dibagi dalam dua kewilayahan kantor pelayanan pajak pada tahun 1999, yaitu KPP Pekanbaru Senapelan dan KPP Pekanbaru Tampan. Wilayah KPP Pekanbaru Tampan meliputi wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kotamadya Pekanbaru (khusus kecamatan Payung Sekaki dan kecamatan Tampan). Saat itu kantor masih menempati sebuah ruko di jalan Riau Ujung No.16 A-C Pekanbaru.

Dengan bergulirnya modernisasi dan restrukturisasi kantor (secara bertahap dimulai tahun 2002), maka pada tahun 2008 berdirilah KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kantor pelayanan pajak terbagi dalam tiga model kantor, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama.

Berdirinya KPP Pratama Pekanbaru Tampan diawali dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-95/PJ/2008 Tentang Penerapan

Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Sumatera Utara II, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, **Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau**, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara pada tanggal 27 Mei 2008. Dengan demikian, sejak saat itu KPP Pratama Pekanbaru Tampan memasuki babak baru dalam modernisasi kantor pelayanan pajak secara nasional.

II.2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

II.2.1. Visi DJP :

" Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi ".

II.2.2. Misi DJP :

" Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien ".

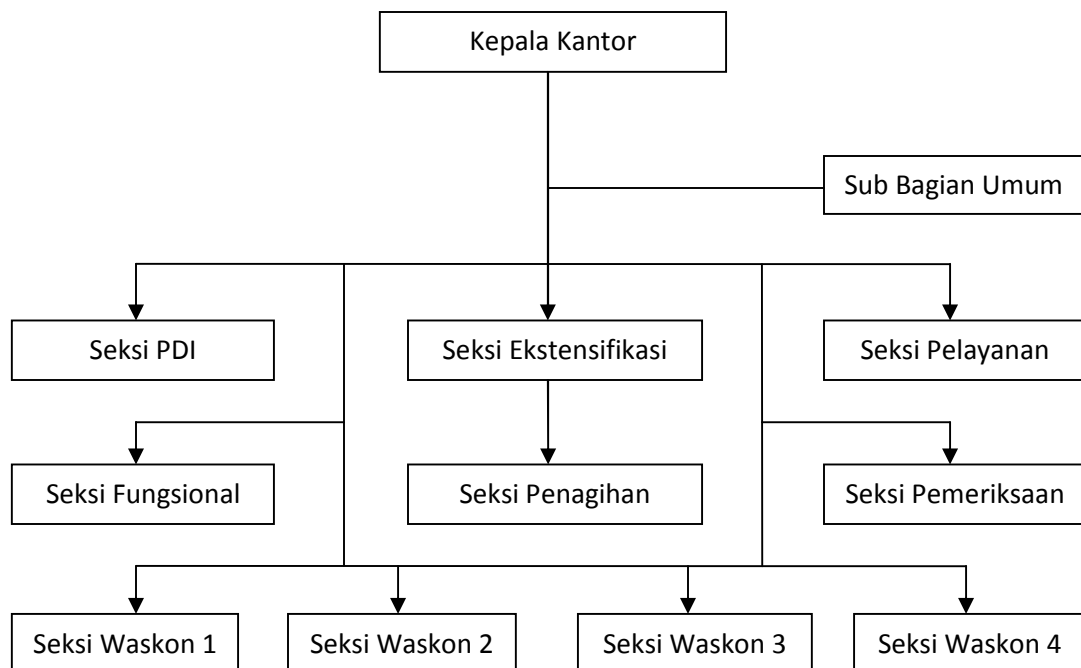
II.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas-tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian dalam sebuah organisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menciptakan keharmonisan dalam bekerja sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan teratur.

Adapun struktur organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut :

Gambar II.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan



Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan

II.4. Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Tampan

a. Kepala Kantor :

Mempunyai tugas mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Umum :

Mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) :

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing serta penyiapan laporan kinerja a.

d. Seksi Pelayanan :

Mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Seksi Penagihan :

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Seksi Pemeriksaan :

Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) :

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan, himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Masing-masing seksi waskon 1, 2, 3 dan 4 memiliki fungsi dan tugas yang sama tetapi yang berbeda hanya cakupan wilayah kerja dan jumlah wajib pajak.

h. Seksi Ekstensifikasi :

Mempunyai tugas melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

II.5. Wilayah Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Sesuai lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, angka 43 : Wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah Daerah Administrasi Pemerintahan yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 24 Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Tampan

- a. Kelurahan Simpang Baru
- b. Kelurahan Tuah Karya
- c. Kelurahan Sidomulyo Barat
- d. Kelurahan Delima

2. Kecamatan Payung Sekaki

- a. Kelurahan Tampan
- b. Kelurahan Air Hitam
- c. Kelurahan Labuh Baru Barat
- d. Kelurahan Labuh Barn Timur

3. Kecamatan Marpoyan Damai

- a. Kelurahan Wonorejo

- b. Kelurahan Tangkerang Barat
- c. Kelurahan tangkerang Tengah
- d. Kelurahan Sidomulyo Timur
- e. Kelurahan Maharatu

4. Kecamatan Bukit Raya

- a. Kelurahan Simpang Tiga
- b. Kelurahan Tangkerang Labuai
- c. Kelurahan Tangkerang Selatan
- d. Kelurahan Tangkerang Utara

5. Kecamatan Sukajadi

- a. Kelurahan Jadirejo
- b. Kelurahan Kampung Tengah
- c. Kelurahan Kampung Melayu
- d. Kelurahan Kedung Sari
- e. Kelurahan Harjo Sari
- f. Kelurahan Sukajadi
- g. Kelurahan Pulau Karam

II.6. Sumber Daya dan Aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Sumber daya dan aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan berjumlah 72 orang yang didominasi oleh pegawai yang berusia relatif muda. Hal ini merupakan suatu kekuatan dan potensi yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ada. Mereka adalah generasi muda perpajakan yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam posisi yang sudah diperbaharui dengan reformasi perpajakan/modernisasi sehingga menjadi andalan dalam setiap tugas yang ada.

Tabel II.1 :

Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	58 orang
2.	Perempuan	14 orang
Total		72 orang

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tabel II.2 :

Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SMA/SMK/MA	6 orang
2.	Diploma 1 (D.1)	15 orang
3.	Diploma 2 (D.2)	-
4.	Diploma 3 (D.3)	18 orang
5.	Srata 1 (S.1)	21 orang
6.	Srata 2 (S.2)	12 orang
7.	Srata 3 (S.3)	-
Total		72 orang

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tabel II.3 :

Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Berdasarkan Tingkat Usia

No.	Tingkat Usia	Jumlah
1.	20 – 29 tahun	29 orang
2.	30 – 39 tahun	23 orang
3.	40 – 50 tahun	17 orang
4.	> 50 tahun	3 orang
Total		72 orang

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

III.1. Tinjauan Teori

III.1.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut beberapa ahli selalu berbeda-beda, meskipun begitu pendapat tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama tentang pajak. Adapun definisi pajak yang dikemukakan beberapa para ahli di bidang perpajakan antara lain :

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2008:1) " Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum ".

Menurut Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2009:1), " Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum ".

Menurut Feldmann dalam Siti Resmi (2009:2), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum ".

Dari definisi di atas dapat kita dipahami sebenarnya penilaian para ahli mengenai pajak adalah sama yaitu ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa unsur pokok yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang pajak serta aturan pelaksanaannya yang berlaku.
- b. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual secara langsung oleh pemerintah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

III.1.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi pokok, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

Fungsi *Budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin ataupun pengeluaran untuk pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara.

Pajak mempunyai fungsi pengatur (*regularent*), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan

III.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, adapun ciri-ciri dari *Official Assessment System* yaitu :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, adapun ciri-ciri *self assessment system* yaitu :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

III.1.4. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)

Asas ini megatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik pengasilan yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan indonesia tetapi berkebangsaan indonesia.

III.1.5. Kepatuhan Perpajakan

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. **Kepatuhan Formal** adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) PPN sebelum jatuh tempo ke KPP, dengan mengabaikan apakah isi SPT tersebut sudah benar atau belum. Yang penting SPT sudah disampaikan sebelum tanggal jatuh temponya.

2. **Kepatuhan Material** adalah suatu keadaan dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga memperhatikan hakekat kewajiban perpajakannya. Di sini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan tanggal penyampaian surat pemberitahuan (SPT) juga memperhatikan kebenaran dan kelengkapan yang sesungguhnya dari isi dan hakekat SPT tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, wajib pajak yang ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a. Tepat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
- c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada masa pajak berikutnya
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk setiap jenis pajak

1. Kecuali telah memiliki izin untuk mengangsur atau menunda untuk pembayaran pajak

2. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk 2 masa pajak terakhir

- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

III.1.6. Pelaporan Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada atasan atau kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab.

Dalam bidang perpajakan, pelaporan dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab dari para wajib pajak atas jumlah pajak yang terutang dalam suatu masa pajak yang sudah ditentukan undang-undang perpajakan. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada pihak pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

III.1.7. Masa Pajak dan Tahun Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat 7 dan 8 disebutkan bahwa :

" Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ".

" Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender ".

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 dalam Pasal 2A disebutkan juga bahwa :

“ Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender ".

III.1.8. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah disebutkan bahwa :

" Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai pada suatu Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Suatu pertambahan nilai tercipta karena adanya kegiatan menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam Daerah Pabean ".

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung. Hal ini dikarenakan Pajak Pertambahan Nilai ini dapat dibebankan kepada pihak lain yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk membayarkannya.

III.1.9. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang ini semula akan mulai berlaku sejak 1 Juli 1984, oleh karena itu dalam Pasal 20 ditentukan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ini dapat disebut dengan nama Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984, berlakunya Undang-Undang ini ditunda sampai dengan selambat-lambatnya awal tahun 1986. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985, Undang-Undang ini ditetapkan mulai berlaku sejak 1 April 1985.

Dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ini telah tiga kali mengalami perubahan yaitu :

1. Mulai 1 Januari 1995 diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 berurutan
2. Mulai 1 Januari 2001 diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 C namun tidak berurutan
3. Mulai 1 April 2010 diubah untuk yang ketiga kalinya dengan Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 2009 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 F

Seiring dengan perubahan ini, maka sejak 1 April 2010 berlaku Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984 dengan sistematika tidak berubah, hanya terdapat penambahan beberapa pasal dan ayat baru.

III.1.10. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951 (UU Pajak Penjualan 1951). Pergantian sistem perpajakan ini dikenal sebagai *Tax Reform 1983* karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan (PPn). Adapun karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

a. Pajak Tidak Langsung

Dalam Pajak Petambahan Nilai (PPN) penanggung jawab pemungutan dan pembayaran pajak berada di pihak pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa, sedangkan pemikul beban (*destinataris*) pajak berada di pihak pembeli barang atau penerima jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban pajak di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat ditentukan oleh adanya objek pajak dan tidak mempertimbangkan kondisi

subjektif subjek pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak objektif akan menimbulkan dampak regresif bahwa semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul. Sebaliknya semakin rendah kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul.

c. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam Daerah Pabeian Republik Indonesia. hal ini sesuai dengan prinsip tempat tujuan (*destination principle*) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahwa PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi atau dimanfaatkan.

d. Bersifat *Multi Stage Levy*

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi atau jalur distribusi barang atau jasa dan bersifat non kumulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda.

e. Perhitungannya dengan *Indirect Subtraction Method*

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara mengurangi Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh penjual atau pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa dengan Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayarkan oleh pembeli atau pengusaha yang menerima barang atau jasa kepada pihak penjual (yang

menyerahkan barang atau jasa).

f. Mempunyai Tarif Tunggal

Penerapan tarif tunggal dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah untuk menyederhanakan dan mempermudah dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan. Tarif tunggal Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang PPN 1984 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 pasal 7 ayat (3) ditetapkan sebesar 10 %. Tarif pajak ini dapat dirubah dengan Peraturan Pemerintah menjadi paling rendah 5 % dan paling tinggi 15 % dengan pertimbangan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan.

III.1.11. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 sudah diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
7. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
8. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

III.1.12. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam pasal 4 ayat 1 huruf a dan huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Nomor 42 Tahun 2009 ditentukan bahwa yang melakukan penyerahan adalah pengusaha. Pengertian "pengusaha" yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Nomor 42 Tahun 2009 adalah :

" Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean ".

Pengusaha ini meliputi pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau seharusnya sudah dikukuhkan namun belum

dikukuhkan sebagai PKP, sehingga dapat dipahami bahwa dalam hal yang pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), maka pada dasarnya Pengusaha ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PKP) dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)
 - a. Pengusaha yang melakukan impor Barang Kena Pajak (BKP), pemanfaatan BKP tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean, dan kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - b. Pengusaha Kecil

Kriteria Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP (jumlah keseluruhan) dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

III.1.13. Syarat Terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Barang atau Jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak (BKF') atau Jasa Kena Pajak (JKP)
2. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean
3. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan

Ketiga persyaratan di atas bersifat kumulatif dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

III.1.14. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu :

- a. Jumlah Harga Jual (nilai berupa uang karena penyerahan BKP)
- b. Penggantian (nilai berupa uang karena penyerahan JKP)
- c. Nilai Impor (nilai berupa uang pada bea masuk ditambah biaya lainnya)
- d. Nilai Ekspor (nilai berupa uang yang diminta oleh eksportir)
- e. Nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

III.1.15. Tarif Pajak dan Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan bahwa :

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 % (sepuluh persen)
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0 % (nol persen) ditetapkan atas :
 1. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud
 2. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud
 3. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP)
- c. Tarif Pajak tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5 % (lima persen) dan paling tinggi 15 % (lima belas persen) yang peraturan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 8A ayat (1) disebutkan bahwa :

“ Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP) “

$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP (Dasar Pengenaan Pajak)}$
--

III.1.16. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa :

"Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ".

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat 12 dan 13 disebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ada dua jenis yaitu Tahunan dan Masa.

"Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak"

"Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak ".

Salah satu jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

III.1.17. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

1. **Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)**, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan perhitungan

jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

2. **Bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dan disetorkannya dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN untuk Pemungut PPN.

III.1.18. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- a. Formulir kertas (*hard copy*)
- b. Data elektronik (e-SPT)

III.1.19. Penyetoran dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak serta pelaporan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010

tanggal 5 April 2010 yaitu :

a. Batas Waktu Penyetoran

Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

b. Batas Waktu Pelaporan

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Jika waktu pelaporan bertepatan dengan hari libur kerja atau libur nasional, penyelenggaraan Pemilihan Umum, cuti nasional, maka SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.

III.1.20. Sanksi Administrasi Perpajakan

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan (SPT) Masa, seperti SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
- b. Denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Sanksi tersebut untuk hal penyampaian surat pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau batas waktu perpanjangan yang telah ditetapkan undang-undang.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan terhadap hal-hal :

- a. Wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia
- b. Wajib pajak orang pribadi tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- c. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga Negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia
- d. Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
- e. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi, tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
- g. Wajib pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

III.1.21. Pandangan Islam Tentang Pajak

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang artinya : mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang memiliki banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut secara wajib oleh Negara.

Definisi pajak menurut syari'ah yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallurn dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* yang berkata bahwa :

" Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah S.W.T kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi baitul mal tidak ada uang/harta ".

Dari definisi pajak di atas, terdapat lima unsur pokok yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syari'ah, yaitu :

- a. Diwajibkan oleh Allah S.W.T
- b. Objeknya adalah harta (al-Mal)
- c. Subjeknya adalah kaum muslim yang kaya (ghaniyyun), tidak non muslim
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim saja)
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan Negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur, yaitu :

- a. Harus ada *nash* (Al qur'an dan Al hadist) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya
- b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non muslim
- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban
- d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum

Dengan adanya definisi di atas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara kontemporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi dharibah/pajak bukanlah zakat), karena kekosongan/kekurangan baitul mal, dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya dan hanya digunakan untuk kepentingan mereka (kaum muslim), bukan kepentingan umum, sebagai jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

Karakteristik pajak (dharibah) menurut syari'ah, yaitu :

- a. Bersifat kontemporer bukan kontinu, karena dipungut jika baitul mal kosong
- b. Dipungut untuk pembiayaan kewajiban bagi kaum muslim saja
- c. Dipungut dari kaum muslim saja, non muslim tidak
- d. Hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya saja, tidak semua kaum muslim

- e. Dipungut sesuai jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih
- f. Dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan lagi (baitul mal terisi lagi)

Sumber-sumber pendapatan baitul mal dalam khilafah islam yang telah ditetapkan syari'at sebenarnya cukup untuk membiayai pengaturan dan pemeliharaan urusan dan kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, sebenarnya tidak perlu lagi ada kewajiban pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Syari'at Islam telah menetapkan pembiayaan atas berbagai keperluan yang dibebankan kepada baitul mal.

Menurut Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, ada beberapa jenis pengeluaran yang dapat dibiayai dengan pajak, yaitu :

- a. Pembiayaan jihad (pembentukan dan pelatihan pasukan,dll)
- b. Pengembangan industry militer dan industry pendukungnya
- c. Pemenuhan kebutuhan pokok orang fakir, miskin dan ibnu sabil
- d. Pembiayaan gaji guru, hakim, tentara, yang semuanya untuk kemaslahatan
- e. Pengadaan fasilitas dan sarana umum
- f. Pembiayaan untuk penanggulangan bencana alam, tapi baitul mal kosong

Oleh karena itu, pajak itu adalah arnanah rakyat. Pajak itu harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat muslim

III.2. Tinjauan Praktek

III.2.1. Pendistribusian SPT Masa PPN di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat (2) bahwa wajib pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) di tempat yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya sudah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam prakteknya, wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dapat mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai di :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat
2. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
4. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
5. Melalui *homepage* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau situs yang dikelola oleh unit Ditjen Pajak lainnya
6. Mencetak/menggandakan dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya

Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan, wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dapat memperoleh SPT Masa PPN secara langsung dengan mendatangi atau menghubungi petugas atau pegawai di bagian informasi. Selain itu wajib pajak tersebut juga bisa memperoleh SPT Masa PPN dengan

membuka situs atau *homepage* KPP Pratama Pekanbaru Tampan melalui jaringan internet secara elektronik.

III.2.2. Pelaporan SPT Masa PPN Ke KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat (3), juga dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) dapat disampaikan :

1. Secara langsung melalui KPP, KP4 setempat
2. Melalui pos secara tercatat
3. Melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak
4. Secara elektronik (*e-filling*) melalui satu atau beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak

Dalam prakteknya, wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dengan langsung mendatangi KPP Pratama Pekanbaru Tampan tepatnya pada bagian Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau melalui kantor pos atau dapat mewakili dengan pihak ketiga yang ditunjuk dengan membawa surat kuasa dari wajib pajak yang bersangkutan secara langsung ke KPP Pratama Pekanbaru Tampan serta dapat juga dengan cara elektronik (*e-filling*).

III.2.3. Bagian Yang Terkait Dengan Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT Masa PPN juga melibatkan bagian-bagian dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terutama pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

Adapun bagian-bagian yang berperan dalam upaya-upaya peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan antara lain yaitu :

1. Seksi Pelayanan dalam melayani dan melakukan bimbingan kepada para wajib pajak yang ingin melaporkan SPT Masa PPN ke KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan melakukan pengawasan secara langsung di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Pekanbaru Tampan
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) yang akan dijadikan sumber dan media untuk memperoleh informasi dan data-data tentang kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan oleh pihak pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu juga menyediakan informasi perpajakan yang nantinya akan diperlukan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN tersebut
3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) yang akan melakukan pengawasan langsung, bertahap dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru

Tampan sesuai cakupan wilayah kerja. Selain itu juga membuka sarana dan media untuk berkonsultasi bagi para wajib pajak yang membutuhkan arahan dan bimbingan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut

4. Seksi Penagihan juga berperan dalam memantau dan melaksanakan kebijakan dari pihak KPP Pratama Pekanbaru Tampan terkait dengan tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak kemudian melakukan penagihan dengan surat paksa dan penyitaan barang milik wajib pajak

III.2.4. Kendala-Kendala dalam Pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Berdasarkan observasi langsung di lapangan, maka ditemukan beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan menyangkut dengan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN yaitu :

1. Tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara umum masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena masih sangat rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan itu sendiri sehingga menimbulkan ketidaktahuan wajib pajak akan arti pentingnya pajak yang mereka bayar.
2. Banyak wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang enggan untuk membayar pajak dan melaporkan pajaknya melalui SPT Masa PPN. Hal ini disebabkan karena banyaknya tahapan-tahapan dan proses yang mereka

anggap menyita waktu mereka mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak.

3. Masih banyak wajib pajak yang enggan untuk melaporkan SPT Masa PPN secara langsung dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Hal ini didasari karena mereka takut jika jumlah hartanya diketahui oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang dengan sendirinya jumlah pajak yang mereka bayar menjadi lebih besar, sehingga mereka lebih mempercayakan pelaporan SPT Masa PPN mereka kepada pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Agustinus, Sonny, Isnianto Kurniawan. 2011. *Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Azhari. 2007. *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*. Pekanbaru. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau
- Bohari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Djuanda, Gustian, Irwansyah Lubis. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Edisi Revisi*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Farid, Masdar. 2010. *Pajak Itu Zakat (Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat)*. Bandung. Mizan Pustaka
- Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto. 2011. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta. Salemba Empat
- Gusfahri. 2007. *Pajak menurut Syariah*. Jakarta. Rajawali Pers
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2008*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Prastowo, Yustinus. 2009. *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta. Raih Asa Sukses
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi Revisi 5*. Jakarta. Salemba Empat
- Rosdiana, Haula, Edi Slamet Irianto. 2010. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta. Visi Media
- Sukaddji, Untung. 2008. *Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, Sebuah Pemahaman Dan Tinjauan Yuridis*. Jakarta. Rajawali Pers

Sukardji, Untung. 2011. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, Edisi Revisi 2011*. Jakarta. Rajawali Pers

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat

Yamin, Mohammad. 2011. *Pratikum Pajak Pertambahan Nilai Dasar*. Yogyakarta. Graha Ilmu

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

INTERNET :

<http://www.pajak news.com>. diakses tanggal 29 Januari 2012 pukul 15.00 WIB

<http://www.pajak online.com>. diakses tanggal 29 Januari 2012 pukul 15.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan di atas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Kepatuhan wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan dalam melaporkan SPT Masa PPN masih sangat rendah. Hal ini dapat terlihat dari rasio kepatuhan yang masih berada di bawah 50 %. Rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi 34,50 % sedangkan rasio kepatuhan wajib pajak badan 43,89 %.
2. Kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah dan belum berjalan dengan baik yang dikarenakan adanya unsur-unsur kepentingan bagi masyarakat terutama wajib pajak. Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan SPT Masa PPNnya. Selain itu wajib pajak juga masih banyak yang terlambat dalam melaporkan SPT Masa PPN dan juga masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan wajib pajak dalam bidang perpajakan.

IV.2. Saran

Dalam meningkatkan pendapatan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan khususnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Antara pegawai pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan dapat menjalin kerjasama yang baik dan harmonis dengan para wajib pajak yang terdaftar. Kerjasama ini dimaksudkan untuk membantu para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga pendapatan negara dari sektor pajak lebih besar.
2. Bagi para wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan baik badan maupun orang pribadi untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dengan begitu diharapkan rasio pajak (*tax ratio*) dapat ditingkatkan kembali.
3. Kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan agar dapat melaksanakan sosialisasi yang lebih maksimal dan menyentuh kepada seluruh kalangan wajib pajak tentang perpajakan dan hal-hal yang berhubungan dengan pajak. Dengan begitu masyarakat selaku para wajib pajak tidak salah dan keliru lagi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang nantinya akan mereka jalani.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Agustinus, Sonny, Isnianto Kurniawan. 2011. *Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Yogyakarta. Penerbit Andi Offset
- Azhari. 2007. *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*. Pekanbaru. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau
- Bohari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Djuanda, Gustian, Irwansyah Lubis. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Edisi Revisi*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Farid, Masdar. 2010. *Pajak Itu Zakat (Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat)*. Bandung. PT. Mizan Pustaka
- Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto. 2011. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta. Salemba Empat
- Gusfahrni. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta. Rajawali Pers
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2008*. Yogyakarta. Penerbit Andi Offset
- Prastowo, Yustinus. 2009. *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta. PT. Raih Asa Sukses
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi Revisi 5*. Jakarta. Salemba Empat
- Rosdiana, Haula, Edi Slamet Irianto. 2010. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta. Visi Media
- Sukardji, Untung. 2008. *Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sebuah Pemahaman dan Tinjauan Yuridis*. Jakarta. Rajawali Pers

Sukardji, Untung. 2011. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia, Edisi Revisi 2011*. Jakarta. Rajawali Pers

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat

Yamin, Mohammad. 2011. *Pratikum Pajak Pertambahan Nilai Dasar*. Yogyakarta. PT. Graha Ilmu

UNDANG-UNDANG :

Direktorat Jenderal Pajak. 2011. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Pekanbaru. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

INTERNET :

<http://www.pajaknews.com>. diakses tanggal 29 Januari 2012

<http://www.pajakonline.com>. diakses tanggal 29 Januari 2012

<http://www.DJP.go.id>, diakses tanggal 29 Januari 2012